

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DIDESA BAWO KECAMATAN TAGULANDANG UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SITARO

Yulani Mangerongkonda
Welson. Y. Rompas
Rully Mambo

This research was conducted to find out effective it is implementation of development programs infrastructure village Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan SITARO. Bawo Village government increases infrastructure through the construction of infrastructure which prioritizes the basic rights of the community and the availability of infrastructure and quality as efforts to support accelerated development and enhancement passion for economic activity. And the problem found in the village of Bawo is how effectiveness of implementing infrastructure development programs in he village of Bawo this research aims to find out how effective it is implementation of infrastructure development in the village Bawo. The method used this study Is a qualititative method for later, fpr later analysis data collection is done by interview directly to the research informant who have determined by qualitative methods, to see how effective it is implementation of infrastructure development programs in the village Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan SITARO. Research use two indicators namely : the amount of result that can be issued meaning that the results are in the form of quantity or physical form the organization, program or activity. The intended result can be seen from Ratio (antara masukan) Input (dengan keluaran) output level of satisfaction obtained. Meaning in this effectiveness can quantitative (based on numbers oe lots) and can be qualitative (based on quality)

Keywords : Effectiveness, Development, Infrastructure

PENDAHULUAN

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang. salah satu upaya pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik yaitu dengan adanya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di beri kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri baik dari segi perencanaan, pembiayaan maupun dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan hingga pembiayaan.

Efektvitas pembangunan merupakan suatu ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan efektifitas pembangunan tersebut maka dukungan dan bantuan dari masyarakat dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti.

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat di perdesaan. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pembangunan desa di laksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan gotong royong. Selanjutnya pasal 82 undang-undang desa menyatakan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa,

dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit (satu) tahun sekali, masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan merupakan suatu proses yang di namis, selain itu pembangunan di tunjukan sebagai suatu usaha kearah peningkatan kesejahteraan dan keadilan yang baik, tetapi apabila tujuan pembangunan yang di jalankan tidak sesuai dengan kebutuhan dan menciptakan kesejahteraan yang kurang baik bagi masyarakat, maka pembagunan itu akan sia-sia. Tujuan dala pembangunan perdesaan jangka panjang adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang secara langsung di lakukan melalui peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Sedangkan tujuan perdesaan jangka pendek adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam atau dapat di rumuskan pembangunan perdesaan di tunjukan untuk menciptakan kawasan perdesaan yang mandiri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan melalui pencapaian kemajuan social dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap meperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Desa merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan Negara. Sehingga boleh di katakana bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat berserta aparaturn pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan di beri kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga desanya. Sehingga bisa mandiri selain sebagai perencanaan dan pelaksana program

pembagunan maka aparaturn pemerintahan desa juga berperan sebagai pelayanan masyarakat dalam dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang di miliki daerah tersebut. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat di perlukan guna menunjang keberhasilan dari program pembangunan partisipasi masyarakat merupakan wujud dari terciptanya kemauan masyarakat dalam suatu program pemerintah yang di tunjukan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat difungsikan sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah program pemerintah bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan desa juga tidak terlepas dari adanya peran serta atau partisipasi aktif anggota masyarakat, baik sebagai kesatuan system maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam system pemerintahan daerah atau desa, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi di tunjuk guna mewujudkan masyarakat sejahtera didaerah atau desa yang bersangkutan.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakasa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk perdesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusi yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai subjek pembangunan karena sebagian penduduk di perdesaan di lihat dari aspek kualitas masih perlu di lakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk perdesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan perdesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan yang di lakukan sebaiknya sesuai dengan permasalahan yang sedang di hadapi oleh suatu desa, karena itu pentingnya perencanaan dalam pembangunan desa juga akan mempegaruhi pada berhasil atau tidaknya pembangunan di perdesaan dilakukan.

Pembangunan desa yang terencana dan terkendali sangat di perlukan agar proses pembangunan desa tersebut berhasil dan memilih output yang efektif. Pentingnya hal tersebut juga harus di dukung oleh kebijakan pemerintah yang baik, tapi tidak cukup jika hanya kebijakan pemerintah yang baik karena sebaik apapun itu kebijakan pemerintah tetapi jika para pelaksana kebijakan itu kurang mampu menjalankannya maka akan menjadi hambatan dalam proses pembangunan, karena berhasil atau tidaknya suatu pembangunan baik nasional maupun perdesaan akan juga terpegaruh dari pelaku atau pemerintah desa dalam proses pembangunan, apabila kemampuan pemerintah desa tidak memadai maka proses pembangunannya cenderung mengalami kemacetan bahkan mungkin suatu kegagalan, karna itu dapat juga di katakan, berhasil atau tidaknya program pembangunan tersebut. Peran pemerintah desa juga tergantung pada kemampuan dari pemerintah desa itu sendiri. Dengan demikian kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa merupakan salah satu aspek yang harus di perhitungkan. oleh karena itu pemerintah desa harus mampu bertanggung jawab atas pembangunan yang di laksanakan di desa tersebut.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan peresaaan telah di lakukan pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dala meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karna itu, kedepan pembangunan desa harus di lakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan masyarakat desa yang sebenarnya. Sehingga pembangunan yang di lakukan di kawasan perdesaan dapat memenuhi dan masyarakatnya tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa kedepan harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan

(kelemahan dan hambatan/ ancaman) yang dihadapi desa.

Saat ini yang menjadi prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro focus pada kualitas layanan public dan ketersediaan infrastruktur dasar serta peningkatan kinerja ekonomi rakyat melalui usaha mikro kecil, menengah dan jasa produktif. Serta peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan manusia dengan tujuan memanfaatkan sumber daya produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan.

Penelitian mengenai pembangunan infrastruktur desa pula sudah pernah dilakukan oleh, Nanda Agnesya Weenas dengan judul kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrstruktur di Desa Karagesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Salah satu kewenangan kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan meruapak salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembagunan infrastruktur bagi masyarakat,, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus di kerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pembagunan masyarakat. Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat di lakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kepemimpinan dan watak seorang pemimpin yang tegas dalam pengambilan keputusan yang dari dahulu memang di oleh setiap pemimpin khususnya kepala desa mulai terkikis untuk di bangkitkan kembali. Tujuan dari pembagunan infrastruktur ini adalah perubahan lebih baik untuk kehidupan masyarakat desa. Dalam praktiknya kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat itu sendiri untuk berpatisipasi dan membantu pemerintah dalam pembagunan desa yang lebih baik.

Pada umumnya program dari pemerintah desa Bawo adalah untuk memajukan desa dengan sarana dan prasarana yang ada di desa melalui

program pemerintah yaitu pembangunan infrastruktur tapi di dalam semua program pembangunan infrastruktur itu masih ada yang tidak terealisasi dengan baik dan benar karena masalah yang timbul yaitu : (1).Tidak maksimalnya pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur seperti tidak ada transparansinya terhadap anggaran sehingga belum tercapainya tujuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ,(2) . Masyarakat yang tidak merasa puas dengan program pembangunan infrastruktur yang ada di desa seperti proses pembebasan lahan yang cukup lama dan juga kurangnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat desa sehingga dari program tersebut ada beberapa pembangunan yang masyarakat tidak merasa puas.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai '' Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa (studi tentang pelaksanaan pembangunan balai desa di desa Bawo Kec. Tagulandang utara Kab. Sitaro). Dengan rumusan masalah ''Bagaimana efektifitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa di desa bawo kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) ? dan manfaat dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa bawo Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO).

Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective yaitu berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. (Draft,2007;12) efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan yang telah ditentukan. Akmal (2006:36) menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (doing te right things) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil.

Abdurahmat (2003:24) --"efektivitas adalah penempatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadara di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Chester Barnard (dalam Gibson dkk, 2000) mendefinisikan efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah di tentukan sebelumnya; dengan kata lain tingkat pencapaian tujuan/sasaran itulah menunjukkan tingkat efektivitas. Mahmudi (2005:92), efektivitas merupakan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Pengertian Infrastruktur

Menurut Grigg (dalam Kodoatie, 2005) infrastruktur merujuk pada system fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangun-bangunan gedung, dan fasilitas public yang lain dan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Misalnya dalam pembangunan jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sector lainnya seperti, pemukiman, perdagangan, kawasan industry, wilayah pusat pemerintah dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur seyogyanya diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar pemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan pemberdayaan tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.

Infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dll. Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara

terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan (Tjokoroamidjojo, 1978:65) Secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu system sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Roger 1985 dalam H.Rochjat (2012). Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke antara kehidupan masyarakat yang lebih baik, bukanlah merupakan fenomena baru. Peradaban manusia tidak akan mencapai wujudnya yang sekarang, apabila tidak terjadi proses perubahan sosial yang terus menerus, meskipun dengan intensitas yang bervariasi, pada masa lalu, akan tetapi pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga. Moeljarto, 1995 (dalam H. Rochajat 2012).

Pembangunan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai control yang lebih besar terhadap lingkungan dan tujuan politiknya, juga memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Inayatullah (dalam Dilla 2007).

Sondang. P. Siagian (dalam Adam Ibrahim 2011) mengemukakan arti pembangunan adalah :

a.Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b.Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terancam yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju moderitas dalam rangka pembinaan bangsa (National Building)

Saul M. Katz (dalam Adam Ibrahim 2011), mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sector ekonomi saja melainkan sector lainnya seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan pada grafik tenaga kerja dan lainnya.

Menurut Dissaynake, (dalam Dilla 2007), yang (dikutip oleh H. Rochajat 2012), pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat, tanpa merusak lingkungan alam dan kultur tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjanjikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa di desa Bawo Kecamatan tagulandang utara Kabupaten Sitaro. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang di peroleh melalui wawancara dengan informan terkait fokuus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapatkan dengan pemelitan langsung ke lokasi penelitian.

Menurut Suharsimi Arikuntu (2006 :160) metode penelitian adalah cara Yng di gunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam peneltian ii metode yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Merupakan metode peneltian yang studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi

tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa yang ada di lapangan studinya. Menurut, Prof.Dr.Sugiyono (2011) metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Lofland dalam Melong (2005;157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama ini dapat di peroleh melalui wawancara atau pengamatan langsung di lapangan, yang kemudian dapat di catat melalui catatan tertulis ataupun melalui perekam suara atau dengan pengambilan foto. Pengambilan data utama melalui pengamatan dan wawancara merupakan penggabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro, dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa. Aspek-aspek yang menjadi focus penelitian adalah :

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil di maksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output)
- b. Tingkat kepuasan yang di peroleh. Artinya dalam efektifitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau

banyak) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).

Hasil dan pembahasan

Mengacu pada pada hasil-hasil penelitian sebagaimana telah di kemukakan pada sebelumnya, maka perlu dijelaskan dan dibahas beberapa hal di antaranya :

1. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa dilihat dari indicator pencapaian tujuan :

Dalam indicator pencapaian tujuan ada dua yaitu sub indicator juga yang perlu di lihat yang terdiri dari tepat waktu dan tepat target atau sasaran. Berdasarkan hasil yang di temui dari kepala desa dan perangkat desa Bawo, bahwa pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa di desa Bawo semua terlaksana dan terselesaikan tepat waktu, dan juga pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa ini tentunya sudah tepat untuk desa Bawo, karna melalui pembangunan tersebut masyarakat desa Bawo sangat merasa terbantu dan juga bermanfaat bagi masyarakat desa Bawo. Adapun beberapa program tersebut yaitu seperti : program pembangunan drainase, jalan setapak, kolam renang, talud penahan tanah, balai desa, posyandu, TK-PKK kampung bawo, batas lindungan, kamtor desa batas kampung (gapura), jembatan.

2. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan di lihat dari indicator tingkat kepuasan.

Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa perdesaan di mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan berjalan dengan baik bisa di katakan berjalan dengan efektif serta peran pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di desa Bawo sangat baik dan pelaksanaannta pembangunan infrastruktur terlaksana dan selesai tepat waktu dan pembangun juga tergantung dari volume bangunan itu sendiri, dan dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur

desa semuanya itu telah di sosialisasikan kepada masyarakat sebelum terjadinya suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu program

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil wawancara sebagaimana telah di rangkum dan dibahas pada bagian sebelumnya, maka berikut ini akan di tarik kesimpulan akhir dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa dari pencapaian tujuan : dari hasil yang di dapatkan di lapangan berdasarkan indicator pencapaian tujuan belum mencapai tujuan karna masalah yang timbul akibat transparasinya anggaran dan program pemerintah yang belum semuanya yan terealisasi dengan baik dan benar
2. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa dari tingkat kepuasan : maka tingkat kepuasan dari masyarakat yang masih kurang akibat ketidaktransparannya pemerintah terhadap anggaran program pembangunan infrastruktur desa.

Saran

Pemerintah harus terbuka atau mengenai setiap anggaran yang akan melaksanakan program pembangunan infrastruktur, dan pemerintah harus lebih baik dalam bersosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat merasa puas dengan setiap program dari pemerintah.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Abdurahmat 2003, *Organisadi dan manajemen sumber daya manusia*, Jakarta. Rineke Cipta

Adam I. I. 2011. *Revisi Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta

Afifudin, 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta

Akmal (2006). *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. Jakarta: PT. Indeks, Kelompok Gramedia

Abdurahmat . 2003:92

Dilla. S. 2007. *Komunikasi pembangunan: Pendekatan Terpadu: Simbosa rekutama media*

Draft, Richard. 2007. *Management Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat

Denim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta; PT Rineka Cipta

Fariani, D. 2014. *Efektivitas program percepatan pembangunan infrastruktur*. Cilengon: fariani

Gibson, James, L, 2000 *Oganisasi, perilaku, struktur dan proses*, Edisi ke-5. Cetakan ke-3 Jakarta : Penerbit erlangga

Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Modern Liberty

Handoko, T. Hani 2008. *Manajemen Personalialia & Sumber Daya Manusia*, Edisi Ke-2 Yogyakarta. Penerbit BPFE

Kodoatie. R. J. 2005. *Pengantar Manajemen infrastruktur*. Yogyakarta: pustaka pelajar

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yokyakarta: UPP AMP YKPM

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1987, *Pengantar Adiministrasi Pembangunan, LP3ES*, Jakarta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alvabeta